

PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE

The Effect of Supervision, Accountability, and Transparency of Financial Management on the Financial Performance of the Local Government of Ende Regency

Charmelia M. R. De Vollys Pera^{1,a)}, Linda Lomi Ga^{2,b)}, Novi Theresia Kiak^{3,c)}
^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Koresponden : ^{a)} leaperand556@gmail.com, ^{b)} linda.ga@staf.undana.ac.id,
^{c)} ovi.kiak@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kabupaten Ende yaitu Tiga Puluh Satu (31) OPD. Data yang digunakan adalah data primer, teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan cara menyebar kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu Kepala Dinas dan Kabag/Kasubbag Keuangan dari setiap OPD di Kabupaten Ende. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Transparansi Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi sektor publik yang dialami Indonesia telah membantu pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mampu mengemban dan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam urusan pemerintahan demi tercapainya suatu kinerja yang baik. Pada tahun 2021 Kabupaten Ende pertama kalinya meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (ntt.bpk.go.id/) masih menemukan beberapa permasalahan yaitu (1) pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan, (2) terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang atas 13 paket pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), (3) pengelolaan belanja tak terduga untuk kegiatan jaring pengaman sosial belum sepenuhnya tertib, dan (4) pengelolaan

aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ende juga belum sepenuhnya tertib. Kemudian pada tahun 2022 Kabupaten Ende kembali meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kedua kalinya dan masih menemukan beberapa permasalahan yaitu penerimaan daerah atas belanja pengujian kendaraan bermotor belum dapat diterima pada tahun 2021 serta terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Dalam hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui kegiatan keuangan dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan dan meneliti bagaimana peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ende.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Jensen and Meckling, (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak antara principal dan agent, dengan melihat delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan juga diterapkan pada sector public. Kaitan teori keagenan dengan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Ende yang memiliki 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan agen yang mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mempublikasikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Rakyat yang berperan sebagai prinsipal yang menginginkan hasil kinerja keuangan pemerintah yang baik dari agen dan salah satu pencapaian tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah proses mengidentifikasi ukuran kinerja dan juga mengambil tindakan yang dapat membantu dalam mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan (Benawan, Saerang and Pontoh, 2018). Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya meliputi segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang (Baswir, 1999).

Pengawasan keuangan daerah penting untuk dilaksanakan, karena pengawasan yang kuat dapat mengelola keuangan menjadi lebih baik, lebih efisien dan mengurangi risiko pemborosan, penyalahgunaan anggaran atau korupsi pengawasan juga dapat menilai keberhasilan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta memastikan penggunaan dana publik secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Halim (2007) dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa (Martini, 2019) mengatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, serta dapat benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD

dan masyarakat atas kegagalan dan keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas (Garung and Ga, 2020) . Transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Annisaningrum, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan dengan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sejumlah 31 OPD. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non Probabilitas dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi dan Kabag/Kasubag Keuangan, berdasarkan kriteria yang ditentukan maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 62 responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survei melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada kepala instansi dan kabag/kasubag keuangan pada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Teknik analisis data dalam penelitian ini tentang pengaruh pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan pengujian hipotesis. Teknik analisis data ini menggunakan IBM SPSS 26.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Adanya pengawasan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena pengawasan yang kuat dapat mengelola keuangan menjadi lebih baik, lebih efisien dan mengurangi risiko pemborosan, penyalahgunaan anggaran atau korupsi serta dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat menilai keberhasilan kebijakan dan program yang dilaksanakan serta memastikan penggunaan dana publik secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Ende telah melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien dan menaati ketentuan hukum yang berlaku serta penggunaan dana anggaran (APBD) didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasi.

3. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah melakukan transparansi mengenai informasi keuangan, seperti anggaran pemerintah daerah, laporan keuangan, kebijakan dan program keuangan, rencana pembangunan, program-program yang sedang berjalan dan informasi terkait pengelolaan keuangan.

Terdapat beberapa hal dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan atau dapat diakses oleh masyarakat, yaitu rincian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dan dukungan media informasi yang terbatas secara umum mengenai organisasi perangkat daerah, antara lain struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah yang menyebabkan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah hanya bersifat spesifik yaitu melalui satu pintu yaitu Bupati dalam hal ini sekretariat daerah dan kepada lembaga legislatif (DPRD).

4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende

Teori agensi (agency theory) menunjukkan adanya hubungan kerja antara pihak agen dan prinsipal berkaitan dengan menyampaikan kinerja keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah kepada masyarakat. Berdasarkan hasil uji simultan (F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dan hasil pengujian yang menggunakan pendekatan kuantitatif maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk menilai keberhasilan kebijakan dan program yang dilaksanakan serta memastikan penggunaan dana publik secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende telah melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan menaati ketentuan hukum yang berlaku serta penggunaan dana anggaran (APBD) didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasi.
3. Transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah melakukan transparansi mengenai informasi keuangan. Namun beberapa hal dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan atau dapat diakses oleh masyarakat, yaitu rincian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dan dukungan media informasi yang terbatas secara umum mengenai organisasi perangkat daerah, antara lain struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah yang menyebabkan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian

Seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Ende diharapkan mampu memadai akses informasi dokumen publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (publik), seperti website resmi pemerintah daerah Kabupaten Ende yang sudah ada yaitu endekab.go.id dapat dikelola dan harus diperbarui secara berkala dan memuat informasi tentang dokumen publik yang tersedia bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ende lebih meningkatkan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mencapai pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah yang sinkron dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta dapat mewujudkan pemerintahan *good governance* seperti yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menambah sampel penelitian dan sebaiknya peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan metode survei dengan kuesioner tetapi ditambah dengan melakukan wawancara, sehingga informasi yang diperoleh tidak terbatas pada kuesioner yang diisi oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- Annisaningrum (2010) 'Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan', *Di Kutip dari Jurnal Ekonomi (Online)* [Preprint]. Available at: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Baswir, R. (1999) *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Ed.2; Cet. Yogyakarta : BPFE, 1993.
- Benawan, E.T.P., Saerang, D.P.E. and Pontoh, W. (2018) 'Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan)', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), pp. 72–79. Available at: <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.19995.2018>.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Garung, C.Y. and Ga, L.L. (2020) 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), pp. 19–27. Available at: <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.
- <https://ntt.bpk.go.id/>
- Jensen, M. and Meckling, W. (1976) 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure', *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, pp. 283–303. Available at: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>.
- Mahsun, M. (2013) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.
- Martini, R. (2019) 'Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa', *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), pp. 106–123. Available at: <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>.